

Kewajiban Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Akta Pengakuan Hutang Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI = Obligation of a Notary in Issuing a Copy of Deed of Recognition of Debt Made Without the Approval of the Married Couple (Study of the High Court Decision of the Special Capital Region of Jakarta No: 108/PDT/2019/PT.DKI)

Putu Ameliagustina Awyadnyani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920531865&lokasi=lokal>

Abstrak

Tesis ini membahas mengenai Notaris dalam kasus No. 108/PDT/2019/PT.DKI yang membuat akta tidak sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam kasus ini dalam membuat akta, Notaris tidak meminta persetujuan pasangan para pihak yang menghadap, dan juga Notaris tersebut tidak mau memberikan Salinan akta tersebut. Permasalahan yang diangkat adalah keabsahan akta dan pertanggung-jawaban notaris, serta kewajiban notaris dalam memberikan layanan berkaitan dengan pengeluaran salinan akta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mengacu pada analisis norma hukum dengan pendekatan kualitatif, menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan datanya berupa studi dokumen. Adapun hasil penelitian adalah isteri dituntut untuk membayar utang atas akta pengakuan utang dari suami, yang telah almarhum, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) suami atau isteri dapat bertindak atas harta bersama berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Tindakan hukum yang dilakukan oleh almarhum tidak sah yang mengakibatkan isi materi dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan batal demi hukum, terhadap akta itu sendiri berdasarkan Pasal 1871 aktanya berubah menjadi akta dibawah tangan. Dalam kasus ini notaris mendapatkan sanksi administratif karena melanggar Pasal 16 UUJN dan dapat diberatkan lagi sanksinya karena tidak memberikan penyuluhan hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 15 UUJN. Selanjutnya kewajiban atas pengeluaran salinan harus dipatuhi mengingat yang meminta akta adalah ahli waris. Bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut notaris atas kerugian, termasuk bunga dan biaya-biaya lain.

.....This thesis discusses the Notary in case No. 108/PDT/2019/PT.DKI which made the deed not in accordance with the applicable provisions. In this case, in making the deed, the Notary did not ask for the approval of the spouses of the parties appearing, and the Notary also did not want to provide a copy of the deed. The issues raised are the validity of the deed and the notary's responsibilities, as well as the notary's obligation to provide services related to the issuance of a copy of the deed. The method used in this research is normative juridical research which refers to the analysis of legal norms with a qualitative approach, using secondary data with data collection tools in the form of document studies. The results of the study are that the wife is required to pay the debt on the deed of acknowledgment of debt from her husband, who has died, based on Article 36 paragraph (1) the husband or wife can act on joint assets based on the agreement of both parties. The legal action taken by the deceased was illegitimate which resulted in the material content in the Deed of Debt Recognition being declared null and void, the deed itself based on Article 1871 the deed turned into a private deed. In this case, the notary is given an administrative sanction for violating Article 16 of the UUJN and the sanctions can be further aggravated for not providing legal counseling in accordance

with the provisions in Article 15 of the UUJN. Furthermore, the obligation to issue copies must be complied with, considering that the heirs who request the deed are the heirs. The aggrieved party can sue a notary for losses, including interest and other costs.